

**AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK
MEMPUNYAI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DALAM DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

OLEH :

**Rizky Satria Pratama
1021211032**



Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H.**
- 2. Ilhamdi Taufik, S.H, M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK
MEMPUNYAI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DALAM DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2015**

Oleh: Rizky Satria Pratama (No BP : 1021211032)

Dibawah Bimbingan : Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H. dan Ilhamdi Taufik, S.H, M.H

Abstrak

Hak memilih adalah hak asasi manusia yang diakui oleh negara hukum. Hak memilih tersebut muncul dalam proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU. KPU melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Akan tetapi dalam peraturan tersebut terdapat sebuah aturan yang memerintahkan untuk mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan. Permasalahan timbul bahwa banyak penduduk yang merupakan penduduk asli daerah pemilihan, dalam hal ini penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dari lahir dan tidak pernah pindah dari Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi mereka tidak mempunyai satupun identitas kependudukan sebagaimana yang dimaksud peraturan KPU No 4 Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yakni membahas proses penerapan syarat adanya identitas kependudukan dalam daftar pemilih di Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 dalam pemilihan kepala daerah, dan implikasi terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia. KPU ingin mengacu pada substansi untuk melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu sebagai mandat konstitusi melampaui sekadar persoalan administratif. KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada akhirnya tetap memasukan pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih yang telah dimasukan ke dalam DPT menimbulkan akibat hukum, yaitu munculnya suatu hak, yakni hak memilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kata Kunci: Hak memilih, syarat identitas kependudukan, hak asasi manusia.

**THE LAW CONSEQUENCE OF THE IMPLEMENTATION ON GENERAL
ELECTIONS COMMISSION REGULATION NUMBER 4-2015 TO THE VOTER
WHO DO NOT HAVE THE POPULATION IDENTITY IN VOTER LIST IN
GENERAL ELECTION OF REGENT
IN PESISIR SELATAN REGENCY 2015**

By : Rizky Satria Pratama (No BP : 1021211032)
Supervised by : Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H and Ilhamdi Taufik, S.H, M.H.

Abstract

The election right is the human right which is confessed by the constitutional state. This right is appear in updating of the voter list registration which is implemented by General Elections Commission. General Elections Commission implements the updating of voter list registration for the election regent/ regency head in 2015 based on General Elections Commission Regulation Number 4-2015. Yet, in this regulation there is the rule commanding to scratch the voter names who are not belong to the population. Where the general election is held which based on the population identity. The problem appear when the origin population, in this case is Pesisir Selatan's population who born, live and never move from pesisir selatan. Do not have any population identity as the mean of the General Elections Commission Regulation Number 4-2015. The design of the research is sociology law research/ empirical reseach. It dissuses the requirement aplication process of population identity in voter list registration of General Elections Commission regulation Number 4-2015 in general election of regent and implication to the indonesia society of constitutional right. Pesisir Selatan Regional General Elections Commission wants to apply the substantial of human right protection in general election as the constitiutonal mandate which is more than only administration's problem. Finally Pesisir Selatan Regional General Elections Commission is still input the voter who do not have population identity into Final Voter List. Voter who is registered in Final Voter List Appearing the law consequence that is the election right in election of Pesisir Selatan Regent.

Keyword; election right, population identity requirement, human right.

